

ABSTRAK

Sedikit masyarakat yang mencantumkan perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan meskipun pemerintah sudah memfasilitasi. Secara umum, sistem pengelolaan zakat dan pajak ini belum mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas. Kurangnya sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah salah satu hambatan. Masyarakat kebingungan atas aturan yang wajib dipenuhi agar zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT, alasan sistem pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT belum mampu mengetaskan kemiskinan, pelaksanaan yang ideal dalam pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Sumber data penelitian berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka sebagai data utama dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pembayaran zakat dan pajak penghasilan profesi notaris dan PPAT belum mampu mengetaskan kemiskinan karena Lembaga amal zakat pemerintah dan swasta masih belum mampu mengumpulkan dana zakat dalam jumlah yang besar.

Alasan sistem pembayaran zakat dan pajak penghasilan profesi notaris dan PPAT belum mampu mengetaskan kemiskinan adalah faktor religius dan faktor non religius. Idealnya pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak penghasilan profesi notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan seperti di Negara Malaysia pajak yang telah dibayarkan oleh setiap individu dapat dikurangkan terhadap sejumlah nilai uang yang sebenarnya bukan merupakan pembayaran pajak.

Kata Kunci: Zakat, Pajak Penghasilan, Hukum Komparatif

ABSTRACT

A few people who tax zakat calculation as a deduction from the government stage have facilitated it. In general, the zakat and tax management system does not reflect accountability and creditability. Lack of socialization regarding zakat as a deduction for the taxable stage is one of the obstacles. The public is confused over the rules that must be fulfilled so that zakat can be a deduction from the taxable stage. The purpose of this study is to see the implementation of the Notary and PPAT professional zakat and Income Tax payment system, the reason for the Notary and PPAT payment system for zakat and income tax not being able to eradicate poverty, ideal implementation of zakat and income tax notary and PPAT in the context of poverty alleviation.

The approach method used in this research is the normative juridical method. The specification of this research is research with descriptive analytical breakdown specifications. Sources of research data are primary and secondary data. Data collection uses literature study as the main data and interviews as supporting data. The data analysis method used in this study is a qualitative method.

The results of the study state that the implementation of the zakat and tax payment system in the stages of the notary profession and PPAT has not been able to eradicate poverty because government and private amil zakat institutions are still unable to collect large amounts of zakat funds.

The reason the notary and PPAT professional zakat and tax payment systems has not been able to incubate poverty are religious factors and non-religious factors. Ideally, the implementation of zakat and tax payments at the professional level of notaries and PPAT in the context of poverty alleviation, such as in Malaysia, taxes that have been deducted by each individual against a number of values that are not actually tax payments.

Keywords: Zakat, Income Tax, Comparative Law